

# KOORDINASI DALAM PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA STUNTING DI KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA

Grandhill Christian Rotinsulu

NPP 31.0888

*Asdaf Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara*

*Program Studi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil*

Email: [31.0888@praja.ipdn.ac.id](mailto:31.0888@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Dr. Dra. Eva Eviany, M.Si

## **ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** Stunting is a chronic nutritional problem that affects children's physical growth and cognitive development and serves as an indicator of human resource quality. Bitung City, located in North Sulawesi Province, ranks 5th out of 15 districts/cities with the highest stunting prevalence in the province. Although the Bitung City Government has launched various programs such as premarital education, school-based food supplementation, and the "Gerakan Minum Susu" (GERIMIS) initiative, the stunting rate remained at 3.10% in 2022. This indicates a gap between program implementation and the expected outcomes. **Purpose:** This study aims to analyze cross-sectoral coordination in the acceleration of stunting reduction in Bitung City. **Method:** This research uses a descriptive qualitative method. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. **Results:** The findings reveal that coordination efforts for stunting reduction have been implemented through cross-sectoral forums and convergence programs. However, coordination has not been optimal. Three key dimensions—communication, division of roles, and discipline—still face significant challenges. Geographical barriers due to the island region, limited training for health cadres, and weak program integration also hinder effective implementation. Nonetheless, there have been positive contributions, including increased public awareness, active participation of TP PKK in premarital education, and targeted nutrition interventions in schools. **Conclusion:** Cross-sectoral coordination in stunting reduction in Bitung City has not yet reached its full potential. Strengthening communication, clarifying institutional roles, improving cadre capacity, and utilizing technology to overcome geographic barriers are necessary. Effective coordination will support the achievement of national stunting reduction targets in a sustainable manner.

**Keywords:** Stunting, Coordination, Bitung City, Cross-Sectoral, Convergence

## **ABSTRAK**

**Rumusan Masalah/Latar Belakang (GAP):** Stunting merupakan masalah gizi kronis yang berdampak pada pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak, serta menjadi indikator kualitas sumber daya manusia. Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, menempati peringkat ke-5 dari 15 kabupaten/kota dengan prevalensi stunting tertinggi di provinsi tersebut. Meskipun Pemerintah Kota Bitung telah mencanangkan berbagai program seperti edukasi pranikah, pemberian makanan tambahan di sekolah, serta Gerakan Minum Susu (GERIMIS), angka stunting masih berada pada 3,10% pada tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan program percepatan penurunan stunting dengan capaian yang diharapkan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi lintas sektor dalam percepatan penurunan angka stunting di Kota Bitung. **Metode:** Penelitian ini menggunakan

metode deskriptif kualitatif. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dalam percepatan penurunan stunting telah dilakukan melalui forum lintas sektor dan pelaksanaan program konvergensi, namun belum berjalan optimal. Terdapat 3 Dimensi yang menghadapi kendala yaitu: komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin. Faktor geografis wilayah kepulauan, minimnya pelatihan kader, serta kurangnya integrasi program turut menghambat efektivitas pelaksanaan. Namun demikian, terdapat kontribusi positif berupa peningkatan kesadaran masyarakat, peran aktif PKK dalam edukasi pranikah, dan intervensi gizi spesifik di sekolah. **Kesimpulan:** Koordinasi lintas sektor dalam percepatan penurunan angka stunting di Kota Bitung belum optimal. Diperlukan penguatan komunikasi, kejelasan pembagian peran antar instansi, peningkatan kapasitas kader, serta pemanfaatan teknologi untuk mengatasi hambatan geografis. Koordinasi yang efektif akan mendukung pencapaian target nasional penurunan stunting secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Stunting, Koordinasi, Kota Bitung, Lintas Sektor, Konvergensi

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Koordinasi merupakan elemen penting dalam manajemen organisasi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan berbagai unit dapat berjalan selaras dan menuju pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Handoko (2016:193) menyebutkan bahwa koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan yang terpisah untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Namun, dalam praktiknya, koordinasi tidak selalu mudah dilaksanakan karena perbedaan tugas, fungsi, dan lokasi antar unit organisasi. Ketidakterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi seringkali menyebabkan kegiatan berjalan secara tumpang tindih atau bahkan tidak terarah.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa dampak signifikan terhadap dinamika pemerintahan modern (Jacob et al:2025). ASN dituntut tidak hanya menguasai aspek teknis pekerjaan, tetapi juga memiliki kompetensi strategis dalam menjawab tantangan globalisasi dan implementasi teknologi digital (Valdivia& López: 2022). Stunting merupakan salah satu tantangan kesehatan masyarakat yang hingga kini masih menjadi perhatian serius di Indonesia. Salah satu isu penting yang menuntut koordinasi lintas sektor adalah permasalahan stunting, yakni kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan. Stunting menjadi ancaman serius bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia, karena dapat mengganggu perkembangan otak anak, menurunkan kemampuan kognitif, dan berdampak pada produktivitas di masa depan. Pemerintah menargetkan penurunan angka stunting menjadi 14% pada tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Dalam hasil studi yang dilakukan oleh Giotopoulos (2025) mengungkapkan bahwa Meningkatnya kompleksitas operasi sektor publik dan kebutuhan akan alokasi tugas yang adil menyoroti keterbatasan metode evaluasi konvensional, yang sering gagal memperhitungkan variasi dalam kinerja karyawan dan tuntutan beban kerja

Di Kota Bitung, stunting menjadi salah satu isu strategis yang masuk dalam prioritas pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung tahun 2022, angka prevalensi stunting masih berada pada 3,10% atau sebanyak 316 anak, dengan Kecamatan Ranowulu dan Lembeh Utara

menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi. Kondisi geografis yang sulit dijangkau menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pemantauan dan intervensi stunting secara merata. Oleh karena itu, keberhasilan program penurunan angka stunting sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan, seperti DPPKB, TP PKK, Puskesmas, dan pemerintah kecamatan.

Melihat pentingnya peran koordinasi dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program percepatan penurunan stunting, maka penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana koordinasi antar instansi dapat dioptimalkan dalam upaya menurunkan angka stunting di Kota Bitung.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Meskipun upaya percepatan penurunan stunting telah menjadi prioritas pemerintah pusat dan daerah, termasuk di Kota Bitung, namun masih ditemukan kesenjangan dalam implementasinya, terutama dari sisi koordinasi antar lembaga. Fakta menunjukkan bahwa beberapa kecamatan yang secara geografis sulit dijangkau seperti Ranowulu dan Lembeh Utara memiliki angka stunting yang lebih tinggi dibandingkan kecamatan lain. Hal ini menunjukkan lemahnya koordinasi dalam pemantauan dan pelaksanaan intervensi gizi secara menyeluruh di wilayah-wilayah terpencil.

Selain itu, belum adanya sistem koordinasi yang terintegrasi sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi menyebabkan terjadinya tumpang tindih program atau bahkan ketidakhadiran intervensi di daerah prioritas. Data dari DPPKB Kota Bitung juga menunjukkan bahwa tidak semua Puskesmas memiliki capaian pengukuran balita yang optimal, yang mengindikasikan belum meratanya perhatian dan koordinasi antar pelaksana program.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara kebijakan penurunan angka stunting yang bersifat top-down dengan implementasi di lapangan yang belum terkoordinasi secara efektif. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana koordinasi antar aktor kunci dalam percepatan penurunan stunting di Kota Bitung dapat diperkuat agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks Percepatan Penurunan Stunting.

Penelitian Pertama oleh Arasati dan Rahmadanik (2023) yang berjudul Koordinasi stakeholder dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi antar pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, puskesmas, dan kader posyandu sangat berperan dalam mendukung keberhasilan intervensi stunting. Model koordinasi yang dilakukan melalui forum rutin dan monitoring terpadu mampu mendorong sinkronisasi program, meskipun masih ditemukan hambatan berupa keterbatasan anggaran dan kurangnya pelatihan teknis bagi pelaksana di tingkat bawah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi kegiatan program stunting di daerah.

Penelitian Kedua oleh Mastina dan Mitra (2023) yang berjudul Peran koordinasi lintas sektor dalam aksi konvergensi penurunan stunting. Hasil penelitian menegaskan bahwa sinergi antar sektor menjadi penentu keberhasilan intervensi gizi spesifik dan sensitif. Keterlibatan sektor

non-kesehatan seperti pendidikan, sosial, dan pertanian sangat penting dalam membentuk jejaring kerja konvergen. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa lemahnya komunikasi horizontal antar dinas dan rendahnya kepemimpinan lokal dalam memfasilitasi koordinasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dan dilakukan di beberapa wilayah dengan angka stunting tinggi.

Penelitian Ketiga oleh Handayani (2023) yang berjudul Efektivitas konvergensi program intervensi percepatan penurunan stunting di tingkat keluarga (Studi di Kabupaten Serang, Banten). Penelitian ini menyoroti efektivitas pelaksanaan intervensi terintegrasi di tingkat rumah tangga, terutama melalui pemanfaatan data by name by address yang dikawal oleh kader dan tenaga kesehatan. Koordinasi antara posyandu, bidan, dan aparat desa dinilai cukup baik dalam menurunkan risiko stunting pada kelompok sasaran. Namun demikian, ditemukan kendala dalam sistem pelaporan dan pemantauan yang belum seragam antar wilayah. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) dengan teknik observasi, wawancara, dan analisis data sekunder.

Penelitian Keempat oleh Desi, Rafiony, Hariyadi, Nopriantini, dan Yulianingsih (2022) yang berjudul Model pemberdayaan kader posyandu dalam pengendalian stunting pada anak usia 0–24 bulan melalui pelatihan pengukuran antropometri. Penelitian ini mengungkap bahwa pelatihan intensif kepada kader posyandu dalam teknik pengukuran dan pemantauan gizi mampu meningkatkan akurasi deteksi stunting dan mempercepat intervensi. Koordinasi lintas sektor juga dilakukan melalui kerja sama dengan puskesmas dan Dinas Kesehatan dalam monitoring terpadu. Hasilnya, terdapat peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader serta penurunan prevalensi stunting di wilayah intervensi. Metode yang digunakan adalah quasi eksperimen dengan pendekatan kuantitatif.

Penelitian Kelima oleh Utami Putri, Hasanbasri, dan Padmawati (2022) yang berjudul Dukungan lintas sektor untuk pencegahan stunting melalui posyandu: Studi kasus di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor antara dinas kesehatan, kader posyandu, dan perangkat kelurahan memberikan dampak positif dalam pelaksanaan edukasi gizi, pemantauan tumbuh kembang, dan penyuluhan sanitasi. Kendala utama yang dihadapi ialah kurangnya integrasi program antar dinas dan terbatasnya partisipasi aktif keluarga sasaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Karya Ilmiah**

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam membahas koordinasi dalam percepatan penurunan angka stunting dengan fokus pada konteks Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Kota Bitung merupakan daerah dengan karakteristik geografis kepulauan yang unik, seperti Kecamatan Lembeh Utara dan Ranowulu, yang menimbulkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program penurunan stunting. Hal ini belum banyak dikaji dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori koordinasi menurut Hasibuan (2011), yang mencakup empat dimensi utama: kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin, sebagai landasan dalam menganalisis koordinasi lintas sektor di tingkat daerah. Pendekatan teoritik ini menjadi nilai tambah yang belum ditemukan pada lima penelitian terdahulu yang lebih banyak menggunakan pendekatan umum terhadap aksi konvergensi.

Jika dibandingkan dengan penelitian oleh Arasati dan Rahmadanik (2023), yang

menelaah koordinasi stakeholder dalam penurunan stunting di Kabupaten Pacitan, fokusnya lebih pada forum monitoring dan evaluasi, bukan pada dimensi koordinasi yang terstruktur sebagaimana dijelaskan dalam penelitian ini. Begitu pula penelitian Mastina dan Mitra (2023) yang mengkaji peran koordinasi lintas sektor dalam aksi konvergensi, namun tidak secara spesifik membahas pembagian kerja dan komunikasi antar lembaga secara lokal seperti yang dianalisis di Kota Bitung. Penelitian oleh Handayani (2023) berfokus pada efektivitas program berbasis rumah tangga di Kabupaten Serang dengan pendekatan data by name by address, yang berbeda dengan pendekatan koordinatif antarinstansi yang dikaji dalam penelitian ini.

Lebih lanjut, penelitian oleh Desi et al. (2022) menyoroti pelatihan kader posyandu untuk pengukuran antropometri, namun tidak membahas dinamika koordinasi antara Dinas Kesehatan, TP PKK, dan lembaga lain dalam pelaksanaan program. Sedangkan penelitian Utami Putri et al. (2022) yang dilakukan di Kota Yogyakarta menyoroti dukungan lintas sektor melalui posyandu, tetapi tidak mengupas secara mendalam pembagian fungsi dan komunikasi lintas perangkat daerah seperti yang ditemukan di Kota Bitung.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi akademik dan praktis melalui pengkajian mendalam terhadap praktik koordinasi dalam program penurunan stunting di daerah dengan tantangan geografis yang kompleks, serta pemanfaatan pendekatan teoritik koordinasi untuk menganalisis efektivitas sinergi antar perangkat daerah dan organisasi masyarakat. Hal ini menjadikan penelitian ini memiliki kebaruan yang signifikan dibandingkan lima penelitian terdahulu yang telah dianalisis.

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana koordinasi dalam penurunan angka stunting di Kota Bitung.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif, seperti yang dijelaskan oleh Pranee Liamputtong dalam bukunya *Qualitative Research Methods* (2020), berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman, perspektif, dan interaksi manusia dalam konteks sosial tertentu. Metode ini mencakup berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena sosial dengan cara yang lebih holistik. Selanjutnya menurut Fatimah (2019) mengatakan bahwa Pendekatan kualitatif lebih cenderung digunakan untuk penelitian yang berkaitan dengan masalah sosial karena dalam penelitian kualitatif data dan penelitian lebih ditekankan.

Metode penelitian kualitatif, yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk mengeksplorasi kondisi objek yang alami dengan peneliti sebagai instrumen utama, menggabungkan beberapa sumber melalui triangulasi, serta menganalisis data secara induktif, dengan fokus pada makna daripada generalisasi (Nurdin & Hartati, 2019:42). Selanjutnya, menurut Bogdan dan Taylor (dalam Ruskarini, 2017:10) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati; pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik.

Dengan menerapkan metode kualitatif pada penelitian ini, bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana koordinasi dalam penurunan angka stunting di Kota Bitung. Data yang dikumpulkan bersifat naratif dan mendalam guna menangkap makna dan

konteks sosial yang tidak bisa dijelaskan secara kuantitatif. Setiap penelitian kualitatif dalam pemerintahan dapat memiliki variasi dalam desainnya, karena disesuaikan dengan sifat alami dari penelitian kualitatif itu sendiri yang bersifat dinamis, di mana fenomena dapat muncul secara tiba-tiba sesuai dengan prinsip alami (Simangunsong, 2017:190).

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sugiyono (2016:225) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data merupakan suatu teknik atau cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, dapat melalui angket, wawancara, pengamatan, ujian, dokumentasi, dan lainnya. Informan penelitian, seperti yang disampaikan oleh Moleong (2015:163), adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini dilaksanakan selama 20 hari, yaitu dari tanggal 6 Januari 2025 hingga 25 Januari 2025.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana koordinasi dalam penurunan angka stunting di Kota Bitung. Peneliti menggunakan Teori Koordinasi menurut Hasibuan (2011:88), yang memiliki 4 dimensi sebagai berikut:

1. Kesatuan Tindakan
2. Komunikasi
3. Pembagian Kerja
4. Disiplin

#### **3.1 Koordinasi Penurunan Stunting di Kota Bitung**

##### **1. Kesatuan Tindakan**

Kesatuan tindakan adalah suatu bentuk kerja bersama yang dilakukan secara terpadu, terkoordinasi, terencana, dan saling mendukung antar unit, instansi, atau pihak-pihak yang terlibat dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pemerintahan seperti penurunan angka stunting semua pihak bergerak serempak, dalam satu arah kebijakan, dengan peran masing-masing untuk mencapai hasil yang maksimal.

##### **a. Bitung Bebas Stunting**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) bekerja sama dengan Dinas Sosial, Tim Penggerak PKK, dan Dinas Kesehatan dalam menyukseskan program "Bitung Bebas Stunting" sebagai upaya terpadu untuk menurunkan angka stunting di Kota Bitung. Pada kesempatan itu Wali kota Bitung menyampaikan, bahwa percepatan penurunan angka stunting merupakan salah satu program prioritas nasional yang harus didukung bersama-sama "Maka dalam kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk lebih serius dan berkomitmen dalam percepatan penurunan stunting melalui kerja nyata, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja berkualitas, dengan membangun strategi, kolaborasi serta akselerasi bersama dengan masyarakat, swasta, organisasi, non pemerintah, dunia usaha, dunia kerja, perguruan tinggi, serta pihak-pihak lainnya," kata Pak Wali Kota. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) bekerja sama dengan Dinas Sosial, Tim Penggerak PKK, dan Dinas Kesehatan dalam menyukseskan program "Bitung Bebas Stunting" sebagai upaya terpadu untuk menurunkan angka stunting di Kota Bitung.

Kolaborasi lintas sektor mencakup penyuluhan gizi, pendampingan keluarga berisiko stunting, pemberian bantuan Susu dan beras, serta pemantauan kesehatan ibu dan anak. Sinergi antarinstansi ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, Terutama di kecamatan kecamatan yang berisiko stunting sekaligus memperkuat peran keluarga dan masyarakat dalam pencegahan stunting. Program ini dilakukan hanya ke kecamatan kecamatan yang sebagai sasaran percepatan karena keterbatasan anggaran

pemerintah Kota Bitung dalam penurunan angka stunting.

b. Kegiatan GERIMIS dan GEMANTEL

Contoh lain dari kesatuan tindakan dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kota Bitung terlihat dalam kolaborasi antarinstansi, seperti antara Dinas Peternakan dengan Dinas Pendidikan, dan TP PKK. Kolaborasi ini menghasilkan program inovatif, yaitu Gerakan Minum Susu (Gerimis) dan Gerakan Makan Telur (Gemantel) yang mulai dijalankan pada tahun 2023.

Di Kota Bitung, Sulawesi Utara, pemerintah daerah telah meluncurkan program "Gerakan Minum Susu dan Makan Telur" sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting pada anak-anak dan ibu hamil. Program ini diresmikan bersamaan dengan peresmian RSUD Pratama Bitung oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan asupan gizi, khususnya protein hewani, guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak serta mencegah stunting. Selain itu, Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri, juga mengampanyekan kebiasaan makan makanan bergizi kepada siswa sekolah dasar. Beliau mendorong siswa untuk rutin mengonsumsi telur, bubur kacang hijau, dan susu setiap hari sebagai sumber protein yang penting untuk perkembangan otak dan kecerdasan anak.

Bentuk intervensi gizi dan bantuan yang diberikan pemerintah Kota Bitung dalam program GERIMIS dan GEMANTEL sangat bertujuan dalam pengembangan gizi anak, sumber gizi dan makanan yang diberikan pemerintah melalui Dinas Peternakan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung sangat membantu dalam pertumbuhan gizi dan anak di Kota Bitung.

c. Pembinaan Ibu Hamil dan Pengantin Muda

Sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting sejak dini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) bersama Tim Penggerak PKK dan Ikatan Dokter Muda melaksanakan kegiatan pembinaan bagi ibu hamil dan calon pengantin. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang pentingnya asupan gizi seimbang, perencanaan kehamilan yang sehat, serta pemahaman akan risiko-risiko yang dapat menyebabkan stunting pada anak. Dalam sesi pembinaan ini, peserta diberikan materi secara interaktif dan praktis, termasuk demonstrasi menu sehat dan konsultasi langsung dengan tenaga medis muda.

Pendampingan ibu hamil dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kota Bitung yang terdiri dari bidan, kader kesehatan, dan petugas KB. Tujuan utama program ini adalah untuk memastikan kesehatan ibu dan janin selama masa kehamilan hingga persalinan. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- Pemeriksaan Kehamilan Rutin Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk memantau perkembangan janin dan kesehatan ibu.
- Pemberian Tablet Tambah Darah Mencegah anemia pada ibu hamil dengan memberikan suplemen zat besi.
- Edukasi Tanda Bahaya Kehamilan: Memberikan informasi mengenai tanda-tanda bahaya selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas

Keterlibatan Ikatan Dokter Muda memberikan nilai tambah dalam penyampaian informasi medis secara akurat dan mudah dipahami, sementara TP PKK berperan aktif dalam menjangkau masyarakat serta mengorganisir pelaksanaan kegiatan di tingkat kelurahan dan kecamatan. Kolaborasi ini menjadi strategi efektif dalam menyebarkan kesadaran tentang pencegahan stunting, dengan harapan ibu hamil dan calon pengantin dapat lebih siap secara fisik dan mental dalam menjalani peran sebagai orang tua. Program ini juga menjadi salah satu langkah konkret dalam mewujudkan generasi yang sehat dan bebas stunting di Kota Bitung.

Jumlah orang yang berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh DPPKB yang bekerjasama dengan TP PKK dan Ikatan Dokter Muda di semua kecamatan yang ada di Kota Bitung yang dilakukan dengan jadwal yang tentatif menyesuaikan dengan keadaan dan situasi di setiap kecamatan, dalam program ini masih banyak juga sasaran ibu hamil dan pengantin muda yang tidak berpartisipasi dalam program yang dijalankan tersebut

hal ini terjadi karena masih banyak orang yang kurang peduli dan menganggap program ini membuang-buang waktu dan banyak juga yang bertabrakan dengan jam kerja dan kesibukan masing-masing penduduk yang ada di kecamatan tersebut.

d. Program Makanan Bergizi

Sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden dalam percepatan penurunan stunting, Dinas Pendidikan Kota Bitung meluncurkan program penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak usia sekolah.

Program ini bertujuan untuk memastikan kecukupan gizi harian anak-anak, khususnya di usia tumbuh kembang, sebagai langkah strategis dalam mencegah stunting sejak dini. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan standar gizi terpenuhi, serta melibatkan DPPKB dalam hal penyuluhan keluarga terkait pola makan sehat.

Dinas Ketahanan Pangan juga terlibat dan berperan penting dalam mendukung penyediaan sumber makanan bergizi dalam upaya penurunan stunting, khususnya melalui program bantuan pangan kepada keluarga berisiko stunting. Sumber makanan yang diberikan biasanya berupa pangan pokok dan sumber protein yang kaya gizi, seperti beras fortifikasi, telur, ikan segar atau ikan olahan, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Bahan-bahan ini dipilih karena mengandung zat gizi penting seperti protein, zat besi, vitamin A, dan asam folat yang sangat dibutuhkan oleh ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak balita.

Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan juga mendorong pemanfaatan pekarangan pangan lestari (P2L) dengan memberikan bantuan berupa bibit sayuran, tanaman obat keluarga (TOGA), dan bahan pangan lokal seperti ubi, talas, atau jagung. Program ini bertujuan agar masyarakat, terutama keluarga dengan anak balita, dapat memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Upaya ini juga menjadi bagian dari ketahanan pangan rumah tangga yang berkelanjutan.

Tidak hanya memberikan bahan pangan, Dinas Ketahanan Pangan juga melakukan pendampingan teknis dan edukasi tentang pengolahan

makanan bergizi, penyimpanan pangan yang aman, serta pengelolaan gizi seimbang berbasis potensi lokal. Dengan adanya dukungan dari dinas ini, diharapkan keluarga di Kota Bitung dapat mengakses makanan bergizi secara rutin, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada penurunan angka stunting secara menyeluruh.

Selain penyediaan makanan, program ini juga disertai dengan edukasi tentang pentingnya pola makan sehat kepada siswa, guru, dan orang tua. Melalui kegiatan seperti sarapan sehat bersama, penyuluhan gizi, dan pelatihan penyusunan menu seimbang, anak-anak diajak untuk memahami manfaat makanan bergizi bagi kesehatan dan pertumbuhan mereka. Dengan membentuk kebiasaan makan sehat sejak dini, diharapkan anak-anak tumbuh optimal, cerdas, dan terbebas dari risiko stunting, sehingga dapat menjadi generasi yang produktif di masa depan.

Polres Bitung turut dilibatkan sebagai perbantuan dalam aspek pengawasan dan pendistribusian makanan bergizi agar berjalan tertib, aman, dan tepat sasaran. Biasanya Polisi di turunkan 3 personil per sekolah dalam kegiatan ini. Kolaborasi lintas sektor ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung program nasional “Indonesia Bebas Stunting,” sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal di Kota Bitung.

Program bantuan pangan bergizi dari Dinas Pendidikan Kota Bitung ditujukan untuk sekolah-sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA sebagai upaya meningkatkan asupan gizi peserta didik dan mendukung penurunan angka stunting sejak usia dini hingga remaja. Melalui program ini, sekolah-sekolah menerima suplai bahan pangan seperti beras fortifikasi, telur, ikan, sayur-mayur, dan buah-buahan lokal yang kemudian diolah menjadi menu sehat bagi siswa. Selain pemberian makanan, program ini juga dilengkapi dengan edukasi gizi dan pola makan seimbang, yang melibatkan guru, siswa, dan orang tua agar tercipta kebiasaan makan sehat di lingkungan sekolah maupun di rumah. Dengan menyoar seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah,

program ini diharapkan dapat menciptakan generasi muda Kota Bitung yang sehat, cerdas, dan terbebas dari risiko stunting serta gizi buruk.

Namun, meskipun program bantuan makanan bergizi ini telah menjangkau sejumlah sekolah di Kota Bitung, masih terdapat beberapa sekolah, terutama yang berada di wilayah terpencil atau dengan keterbatasan akses, yang belum menerima bantuan tersebut. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, distribusi logistik, dan prioritas sasaran berdasarkan data angka stunting atau risiko gizi buruk. Akibatnya, tidak semua siswa di Kota Bitung mendapatkan manfaat langsung dari program ini secara merata. Oleh karena itu, perlu adanya upaya perluasan cakupan dan penguatan koordinasi lintas sektor agar seluruh sekolah, tanpa terkecuali, dapat memperoleh akses terhadap program pangan bergizi guna mendukung tumbuh kembang anak yang optimal.

Dalam pelaksanaan kesatuan tindakan ini, Dinas Kesehatan Kota Bitung berperan sebagai instansi penggerak dan pendorong utama yang memfasilitasi kerja sama lintas sektor, baik dengan seluruh perangkat daerah (seperti DPPKB) maupun dengan organisasi non-pemerintah. Upaya koordinatif ini telah menunjukkan perkembangan positif dan mulai berjalan secara efektif pada tahun 2023.

## **2. Komunikasi**

Komunikasi yang terjadi dalam koordinasi penurunan stunting yaitu pertukaran informasi, pemikiran, dan pesan secara sistematis dan berkesinambungan antara seluruh pemangku kepentingan baik antar OPD, lintas jenjang pemerintahan, maupun dengan Masyarakat guna membangun pemahaman bersama, menyatukan langkah, dan mendorong perubahan perilaku dalam rangka percepatan penurunan angka stunting.

Dalam pelaksanaan koordinasi percepatan penurunan stunting di Kota Bitung, komunikasi yang efektif menjadi prinsip dasar yang tidak boleh diabaikan, karena merupakan kunci utama dalam menciptakan koordinasi yang optimal (Hasibuan, 2011). Komunikasi yang diterapkan dalam program ini dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi langsung biasanya dilakukan melalui rapat koordinasi tatap muka yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Dalam pelaksanaan koordinasi percepatan penurunan stunting di Kota Bitung, komunikasi yang efektif menjadi prinsip dasar yang tidak boleh diabaikan, karena merupakan kunci utama dalam menciptakan koordinasi yang optimal. Komunikasi yang diterapkan dalam program ini dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi langsung biasanya dilakukan melalui rapat koordinasi tatap muka yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Rapat koordinasi penurunan stunting di Kota Bitung merupakan forum strategis yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, Bappeda, TP-PKK, camat, lurah, serta organisasi masyarakat untuk menyatukan visi, menyelaraskan program, dan memperkuat sinergi dalam percepatan penurunan stunting.

Platform media sosial yang dipakai pemerintah Kota Bitung dalam membantu menyebarkan dan ber komunikasi secara tidak langsung atau online bersama masyarakat dalam membantu percepatan penurunan angka stunting di Kota Bitung. Dengan memanfaatkan media digital yang digunakan untuk menyampaikan informasi ringan seputar pelaksanaan program dan kegiatan stunting, Adapun topik-topik yang bersifat penting dan membutuhkan diskusi mendalam tetap dibicarakan melalui pertemuan langsung. Komunikasi tidak langsung ini umumnya difungsikan untuk konsultasi, pemberian arahan, serta bimbingan (Manullang, 2006).

Namun demikian, implementasi komunikasi yang efektif dalam koordinasi penurunan angka stunting di Kota Bitung masih menemui kendala. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat kehadiran para pimpinan

SKPD dalam rapat koordinasi, yang mengakibatkan kurangnya penyebaran informasi

dan masih sering terjadi kesalahpahaman. Minimnya partisipasi aktif, respon, serta keterlibatan beberapa SKPD menjadi salah satu faktor penghambat dalam kelancaran pelaksanaan berbagai program, yang seharusnya dapat berjalan dengan baik.

Komunikasi ke Masyarakat juga sangat penting dalam percepatan penurunan angka stunting di Kota Bitung sehingga hal ini perlu juga di perhatikan oleh SKPD terkait dalam proses Upaya penurunan stunting. Komunikasi dengan masyarakat adalah proses penyampaian informasi, edukasi, dan ajakan secara terbuka, dua arah, dan berkelanjutan kepada individu, keluarga, dan komunitas, dengan tujuan mendorong perubahan perilaku positif dalam mencegah dan menurunkan stunting, Contoh : sosialisasi yang dilaksanakan kepada Ibu hamil dan pengantin muda yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk Kota bitung di kecamatan Ranowulu dalam rangka pencegahan stunting.

Sosialisasi itu bertujuan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya mencegah stunting sejak dini, terutama pada periode emas 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan lebih peduli dan tergerak untuk mengambil tindakan preventif mengingat di kecamatan Ranowulu adalah kecamatan yang memiliki prevlensi stunting yang tinggi dibandingkan dari kecamatan yang lain. Program juga tidak hanya dilaksanakan di kecamatan ranowulu di kecamatan yang ada di Kota Bitung juga dilaksanakan kegiatan yang sama sesuai jadwal yang di laksanakan setiap bulan di berbeda Kecamatan.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bitung juga menyelenggarakan seminar daring mengenai pencegahan stunting yang ditujukan khusus bagi para ibu kader di setiap kelurahan. Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan para kader dalam mendeteksi dini serta menangani faktor-faktor risiko stunting di lingkungan masing-masing. Melalui platform digital, para peserta mendapatkan materi langsung dari para ahli gizi dan kesehatan, serta diberikan ruang untuk berdiskusi dan berkonsultasi mengenai peran aktif mereka dalam mendampingi keluarga-keluarga berisiko stunting.

Pelaksanaan seminar secara daring ini memungkinkan jangkauan peserta yang lebih luas tanpa terkendala jarak dan waktu, serta mendorong efisiensi dalam penyampaian informasi yang seragam di seluruh kelurahan. Para ibu kader diharapkan dapat menjadi ujung tombak edukasi di masyarakat, menyampaikan kembali informasi yang diterima kepada warga secara langsung. Dengan adanya kegiatan ini, DPPKB berharap terjadi peningkatan kesadaran kolektif dan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan generasi Kota Bitung yang sehat dan bebas dari stunting.

Para ibu kader di masing-masing kelurahan di Kota Bitung secara aktif memberikan penyuluhan mengenai pentingnya pencegahan stunting di puskesmas-puskesmas setempat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk menyampaikan informasi yang tepat dan mudah dipahami oleh masyarakat, khususnya para ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga yang memiliki balita. Materi yang disampaikan meliputi pentingnya asupan gizi seimbang, pola asuh yang tepat, serta sanitasi dan kesehatan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Dengan pendekatan yang komunikatif dan berbasis pada kedekatan sosial, para kader menjadi penghubung efektif antara program pemerintah dan masyarakat. Kehadiran mereka di puskesmas bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pendamping yang mampu dan memberikan motivasi dan solusi praktis bagi keluarga yang berisiko. Melalui peran aktif para kader ini, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan

stunting semakin meningkat dan mampu menurunkan angka stunting di Kota Bitung secara signifikan.

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh para ibu kader ini juga didukung oleh tenaga kesehatan puskesmas yang turut memberikan informasi medis dan teknis secara lebih mendalam. Kolaborasi antara kader dan petugas kesehatan menciptakan sinergi yang kuat dalam menyampaikan pesan-pesan kunci terkait stunting, seperti pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin, pemberian ASI eksklusif, dan pemantauan tumbuh kembang anak. Selain itu, kader juga membantu mengidentifikasi dan mendampingi keluarga yang termasuk dalam kelompok

rawan stunting agar mendapatkan perhatian dan intervensi.

Penyuluhan ini dilakukan secara berkala dan menjadi bagian dari program kerja puskesmas serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bitung. Dengan adanya keterlibatan aktif para kader, pendekatan edukasi menjadi lebih personal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Program ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat, tetapi juga memperkuat solidaritas dan kepedulian antarwarga dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung tumbuh kembang anak bebas stunting.

Komunikasi memegang peranan krusial dalam percepatan penurunan angka stunting di Kota Bitung karena dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, mendorong perubahan perilaku, serta memperkuat koordinasi antarinstansi terkait. Melalui komunikasi yang tepat, informasi mengenai pentingnya gizi seimbang, pola asuh yang sehat, serta akses layanan kesehatan dapat tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat, khususnya kepada ibu hamil dan keluarga dengan balita. Selain itu, komunikasi yang baik mendorong partisipasi aktif masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap program pemerintah, sehingga intervensi yang dilakukan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran dalam menekan angka stunting di daerah tersebut. Jadi masih banyak juga upaya yang bisa dilaksanakan pemerintah Kota Bitung terkhususnya kepada SKPD yang punya peran dalam menekan laju pertumbuhan Stunting di Kota Bitung sehingga tujuan Kota Bitung menjadi Kota bebas stunting dapat terwujud.

### **3. Pembagian Kerja**

Pembagian kerja antar OPD dalam koordinasi penurunan angka stunting adalah bentuk kolaborasi lintas sektor yang terstruktur dan terintegrasi, di mana setiap Organisasi Perangkat Daerah memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi berdasarkan kewenangan masing-masing dalam upaya percepatan penurunan Stunting di Kota Bitung.

Dinas Kesehatan kota Bitung fokus pada intervensi spesifik seperti layanan kesehatan ibu dan anak, Dinas Kesehatan memiliki peran penting dalam percepatan penurunan stunting melalui pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang komprehensif, meliputi pemeriksaan kehamilan (ANC), pemantauan tumbuh kembang balita, imunisasi yang dilakukan di setiap puskesmas di Kota Bitung, pemberian vitamin A dan tablet tambah darah, serta penyuluhan gizi dan kesehatan di kelurahan yang jauh dari jangkauan pusat ekonomi seperti di Kecamatan Ranowulu dan Lembeh Selatan. Selain itu, Dinas Kesehatan juga memastikan tersedianya tenaga kesehatan yang terlatih, sarana pelayanan yang memadai, dan kegiatan promotif-preventif yang menyoar keluarga pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), sehingga intervensi spesifik yang diberikan dapat langsung menyoar akar penyebab stunting dari sisi kesehatan dan gizi. Hal tersebut tidak sejalan dengan hambatan yang ditemukan dalam penelitian Busiri & Junianto (2023) yang menemukan ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai masih menjadi faktor penghambat kinerja aparatur sipil negara dalam penerapan SPBE di lingkup BKPSDM Kabupaten Bandung Barat.

DPPKB atau Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berfokus memperkuat peran keluarga dan pendampingan melalui Kader dan program BKB Di Kota Bitung Kegiatan yang dilakukan meliputi pendampingan keluarga berisiko stunting oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), edukasi kesehatan reproduksi dan gizi kepada calon pengantin, remaja, serta ibu hamil dan menyusui, serta pelaksanaan program Bina Keluarga Balita (BKB) untuk meningkatkan kapasitas pengasuhan. Selain itu, DPPKB juga melakukan pendataan keluarga, pemetaan risiko stunting, dan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan konvergensi program berjalan efektif di tingkat kelurahan dan kecamatan, Dinas Pendidikan memberikan edukasi kesehatan di sekolah, Dinas PUPR dan Perkim memastikan ketersediaan sanitasi dan air bersih, Dinas Sosial menyalurkan bantuan sosial untuk keluarga berisiko, Dinas Ketahanan

Pangan mendukung pemenuhan gizi keluarga, dan BAPPEDA berperan sebagai koordinator perencanaan serta penganggaran. Pemerintah kelurahan menjadi ujung tombak pelaksanaan aksi konvergensi di tingkat masyarakat. Sinergi ini bertujuan untuk menciptakan intervensi yang terpadu, efektif, dan berkelanjutan guna mempercepat penurunan angka stunting secara nasional maupun lokal.

Dinas Pendidikan Kota Bitung turut berperan aktif dalam penurunan stunting melalui pelaksanaan program makanan bergizi di lingkungan sekolah, khususnya jenjang SD, SMP dan SMA. Program ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi peserta didik dengan menyediakan makanan sehat dan bergizi secara berkala.

Polres Bitung juga memiliki peran dalam pengamanan pelaksanaan program penurunan stunting, khususnya dalam menjaga kelancaran distribusi bantuan pangan, pelayanan kesehatan, dan kegiatan-kegiatan sensitisasi yang melibatkan masyarakat. Dalam beberapa situasi, Polres Bitung dapat memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, seperti posyandu atau pelaksanaan vaksinasi, berlangsung dengan aman dan tertib

Selain OPD yang ada di Kota Bitung ada juga Lembaga masyarakat yang berperan penting dalam melakukan Koordinasi Penurunan Angka Stunting di Kota Bitung yaitu TP PKK atau Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) TP-PKK Kota Bitung dalam penurunan stunting sangat berfokus pada pemberdayaan keluarga dan masyarakat, karena keluarga merupakan unit terkecil yang paling berperan dalam pencegahan stunting. TP-PKK berperan aktif dalam memberikan penyuluhan kepada ibu hamil, ibu menyusui, serta keluarga dengan anak balita terkait pentingnya pola makan sehat dan pemenuhan gizi seimbang. Salah satu kegiatan utama TP-PKK adalah mengedukasi masyarakat tentang 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang merupakan periode kritis untuk pertumbuhan anak. Melalui kegiatan ini, TP-PKK memberikan informasi terkait pemberian ASI eksklusif, pentingnya makan bergizi, serta cara-cara pencegahan stunting yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, TP-PKK Kota Bitung juga melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat yang mendukung ketahanan pangan keluarga. Program seperti Pangan Lestari dan Kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (UP2K) bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga dan memastikan ketersediaan pangan yang bergizi dengan memanfaatkan pekarangan rumah. TP-PKK mendorong keluarga untuk menanam sayuran, buah-buahan, dan sumber pangan lainnya yang dapat mencukupi kebutuhan gizi anak-anak mereka. Melalui pelatihan memasak dengan bahan lokal dan murah, masyarakat diharapkan dapat mengolah makanan yang bernutrisi tanpa bergantung pada bahan makanan mahal, yang dapat membantu mencegah stunting di tingkat keluarga.

TP-PKK Kota Bitung juga aktif melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program penurunan stunting di tingkat kelurahan. Dengan melibatkan kader-kader yang tersebar di berbagai wilayah, TP-PKK mengadakan kunjungan rumah untuk memantau status gizi anak, memberikan arahan tentang pola makan sehat, dan mendampingi keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak mereka. Kader TP-PKK juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan instansi terkait lainnya untuk mengintegrasikan program penurunan stunting dengan berbagai kegiatan kesehatan dan pendidikan, sehingga dapat tercapai hasil yang optimal dalam menurunkan angka stunting di Kota Bitung.

Selain itu, TP-PKK Kota Bitung juga berperan dalam penguatan program-program pemerintah yang mendukung penurunan stunting, seperti Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). TP-PKK turut mengkoordinasi dan mendampingi kegiatan Posyandu, yang menjadi salah satu tempat penting untuk memantau pertumbuhan anak serta memberikan imunisasi dan penyuluhan gizi.

Program unggulan seperti Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) yang dilakukannya setiap hari sabtu di setiap Kecamatan yang jauh dari jangkauan pusat ekonomi seperti di kecamatan lembah utara dan lembah selatan yang letak geografisnya berbeda pulau dengan Kota

Bitung membuat daerah ini sulit dijangkau dan harus melalui perjalanan laut, pemanfaatan pekarangan, dan kegiatan Posyandu didukung aktif oleh TP PKK sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung intervensi sensitif. Dengan pendekatan berbasis keluarga dan komunitas, TP PKK menjadi ujung tombak dalam menyebarkan informasi dan membangun kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan menurunkan angka stunting.

#### **4. Disiplin**

Disiplin dalam konteks koordinasi merujuk pada kemampuan setiap individu atau pihak yang terlibat untuk secara konsisten menaati aturan, jadwal, dan tanggung jawab yang telah disepakati bersama demi tercapainya tujuan kolektif.

Salah satu permasalahan disiplin yang terjadi dalam koordinasi di Kota Bitung yaitu pelaporan data, pelaksanaan intervensi gizi, serta pendistribusian bantuan yang tidak tepat waktu yang dilakukan satu pihak dapat menghambat proses di sektor lain, menyebabkan ketidaktepatan sasaran dan waktu, yang pada akhirnya berdampak pada tidak tercapainya target penurunan stunting. Kondisi geografis di Kota Bitung juga biasanya menjadi alasan terjadi kendala dalam penyaluran bantuan ataupun penyelenggaraan kegiatan seperti sosialisasi di karenakan ada beberapa wilayah yang susah dijangkau karna berada di pegunungan dan ada yang berada di kepulauan seperti Kecamatan Lembeh Utara dan Kecamatan Lembeh Selatan.

Salah satu hambatan utama dalam koordinasi penurunan stunting di Kota Bitung adalah data yang tidak akurat, kurangnya komunikasi lintas sektor, dan keterbatasan sumber daya manusia. Data yang tidak valid atau tidak terintegrasi antar sektor menyebabkan kesalahan dalam perencanaan, alokasi sumber daya, serta evaluasi program, sehingga mengurangi efektivitas intervensi. Komunikasi yang lemah antar instansi menyebabkan program berjalan sendiri-sendiri, tanpa sinergi dan kepemilikan bersama, serta rentan terhadap tumpang tindih kegiatan. Di sisi lain, keterbatasan jumlah dan kualitas SDM, termasuk tenaga kesehatan dan kader posyandu, menghambat pelaksanaan program secara merata dan tepat sasaran karena kurangnya pelatihan dan pemahaman mendalam mengenai stunting.

Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi tantangan besar karena keberhasilan program sangat bergantung pada kesadaran dan keterlibatan aktif keluarga serta komunitas. Ketidaktahuan tentang pentingnya gizi dan pola asuh yang tepat, ditambah faktor sosial ekonomi, budaya, dan kepercayaan terhadap mitos, menyebabkan intervensi pemerintah tidak sepenuhnya diterima. Minimnya partisipasi ini membuat pelaksanaan program menjadi satu arah dan menyulitkan koordinasi antar sektor. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem informasi yang terpadu, pelatihan SDM, forum komunikasi lintas sektor, serta strategi pemberdayaan masyarakat agar penurunan angka stunting dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.

Disiplin dalam koordinasi merupakan kunci utama dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kota Bitung. Setiap instansi yang terlibat, mulai dari DPPKB, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, hingga TP PKK dan para kader di lapangan, perlu memiliki komitmen yang sama dalam menjalankan peran dan tugas masing-masing secara tepat waktu dan terkoordinasi. Ketepatan jadwal rapat, kejelasan alur komunikasi, serta kesigapan dalam menindaklanjuti hasil keputusan menjadi bagian penting dari disiplin ini, agar program berjalan efisien dan menyentuh sasaran secara menyeluruh.

Tanpa kedisiplinan dalam koordinasi, program yang sudah dirancang dengan baik berisiko terhambat, bahkan gagal mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pelaporan yang rutin dan transparan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi lintas sektor untuk memastikan seluruh pihak bergerak searah. Dengan koordinasi yang disiplin dan berkesinambungan, penanganan stunting di Kota Bitung dapat dilakukan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan generasi masa depan yang sehat dan berkualitas.

### **3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar pemangku kepentingan di Kota

Bitung dalam percepatan penurunan angka stunting telah berjalan, namun belum optimal. Dalam konteks ini, terdapat beberapa aspek utama yang menjadi fokus analisis: kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin, sebagaimana dijelaskan oleh Hasibuan (2011). Setiap dimensi ini menunjukkan hasil yang beragam di lapangan.

Pertama, dari sisi kesatuan tindakan, meskipun sudah terdapat komitmen bersama dalam RPJMD dan aksi konvergensi stunting, pelaksanaan di tingkat kecamatan dan kelurahan masih menghadapi hambatan koordinasi akibat ketimpangan pemahaman antar pihak. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Arasati dan Rahmadanik (2023) yang menemukan bahwa forum koordinasi antar stakeholder di Kabupaten Pacitan mampu menciptakan sinergi dan rencana aksi bersama yang lebih terstruktur. Di Kota Bitung, kesatuan tindakan antar dinas dan pelaksana masih terhambat oleh tumpang tindih kegiatan dan keterbatasan komunikasi lintas sektor.

Kedua, pada aspek komunikasi, ditemukan bahwa masih banyak informasi program yang tidak tersampaikan secara menyeluruh, baik kepada pelaksana teknis maupun masyarakat. Meskipun telah dilakukan sosialisasi, informasi belum merata hingga ke wilayah-wilayah kepulauan seperti Kecamatan Lembeh Utara. Temuan ini juga berbeda dengan penelitian Mastina dan Mitra (2023), di mana komunikasi lintas sektor menjadi tulang punggung keberhasilan konvergensi penanganan stunting di daerah studi mereka. Di Bitung, minimnya media komunikasi digital serta kurangnya pelatihan lintas sektor memperlambat proses penyelarasan informasi.

Ketiga, dalam hal pembagian kerja, ditemukan bahwa sebagian perangkat daerah seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan belum sepenuhnya terlibat dalam intervensi sensitif, padahal perannya sangat dibutuhkan dalam penyediaan infrastruktur dasar dan edukasi gizi. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian kerja di Kota Bitung belum sepenuhnya efektif. Temuan ini memperkaya hasil penelitian Handayani (2023) yang lebih menekankan efektivitas intervensi di tingkat keluarga, namun belum mengulas bagaimana pembagian kerja antar dinas berpengaruh dalam skala kota/kabupaten.

Keempat, dari segi disiplin pelaksanaan, banyak kader posyandu yang telah aktif namun belum mendapatkan insentif atau dukungan pelatihan rutin. Penelitian Desi et al. (2022) memang menunjukkan bahwa pelatihan kader berperan penting dalam menurunkan angka stunting, namun dalam kasus Kota Bitung, pelatihan yang tidak berkelanjutan menyebabkan kualitas pendataan dan pemantauan tumbuh kembang anak tidak seragam antar wilayah.

Selanjutnya, hasil penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya dukungan lintas sektor dalam pelaksanaan program seperti GERIMIS (Gerakan Minum Susu) dan edukasi pranikah yang dijalankan oleh TP PKK dan Dinas Kesehatan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Utami Putri et al. (2022) yang menunjukkan pentingnya integrasi antara kader posyandu dan perangkat kelurahan. Namun, penelitian ini lebih menyoroti kompleksitas tantangan geografis seperti wilayah kepulauan yang menyebabkan akses pelayanan tidak merata, sebuah hal yang belum dijelaskan dalam kelima penelitian terdahulu.

Secara umum, hasil penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa efektivitas koordinasi tidak hanya ditentukan oleh adanya komitmen lintas sektor, tetapi juga oleh kedalaman struktur koordinasi yang menyentuh hingga tingkat implementasi teknis dan kondisi geografis wilayah. Penelitian ini juga menghadirkan kebaruan melalui penerapan teori koordinasi Hasibuan dalam konteks program stunting di wilayah kepulauan, serta mengangkat realitas operasional dan tantangan koordinatif yang belum terungkap dalam studi terdahulu.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang didapatkan penulis di lapangan selama masa penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Koordinasi yang terjadi di Kota Bitung dalam percepatan penurunan angka stunting sangat berdampak dalam kelancaran program penurunan stunting yang dilakukan pemerintah Kota Bitung. SKPD yang terlibat sangat berperan aktif dalam rangka membantu percepatan penurunan stunting di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Kota Bitung menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius dan penanganan terpadu. Hambatan seperti kurangnya sumber daya manusia, komunikasi lintas sektor yang belum optimal, data yang tidak akurat, serta rendahnya partisipasi masyarakat menjadi faktor penghambat utama dalam upaya penanggulangan stunting secara menyeluruh. Meskipun pemerintah telah menginisiasi berbagai program dan intervensi, efektivitas pelaksanaannya sangat bergantung pada masyarakat itu sendiri. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pencegahan stunting turut memperlambat pencapaian target. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi anak, pola asuh, sanitasi, dan pemanfaatan layanan kesehatan masih perlu ditingkatkan. Rendahnya keterlibatan ini bisa disebabkan oleh kurangnya informasi yang sampai ke masyarakat, pengaruh budaya, atau kondisi ekonomi.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu instansi pemerintah saja yakni Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung sebagai model studi kasus yang dipilih.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa Koordinasi Dalam Percepatan Penurunan Angka Stunting di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arasati, N., & Rahmadanik, D. (2023). Koordinasi stakeholder dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. *Jurnal Widya Publika*, 11(2), 45–58. <https://doi.org/10.70358/widyapublika.v11i2.1107>
- Busiri., & Junianto, D. J (2023) Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat. <http://eprints.ipdn.ac.id/13471/>
- Desi, Y. R., Rafiony, A., Hariyadi, D., Nopriantini, N., & Yulianingsih, K. (2022). Model pemberdayaan kader posyandu dalam pengendalian stunting pada anak usia 0–24 bulan melalui pelatihan pengukuran antropometri. *Gema Kesehatan: Jurnal Poltekkes Kemenkes Jayapura*, 15(2), 75–84. <https://doi.org/10.47539/gk.v15i2.426>
- Giotopoulos, K. C., et al. (2025). Dynamic workload management system in the public sector: A comparative analysis. Department of Management Science and Technology, University of Patras. <https://www.scopus.com/pages/publications/105001254724>
- Handayani, B. (2023). Efektivitas konvergensi program intervensi percepatan penurunan stunting di

- tingkat keluarga (Studi di Kabupaten Serang, Banten). *Jurnal Riset Ilmu Kesehatan Umum dan Farmasi*, 2(3), 142–150. <https://doi.org/10.57213/jrikuf.v2i3.294>
- Handoko, T. (2016). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Hasibuan, M. (2014). *Manajemen : Sumber Daya Manusia*. Jakarta Bumi Aksara
- Jacob, U. S., Fredrick, V. A., & Pillay, J. (2025). Aggressive behavior among individuals with intellectual disability: Predictive factor analysis. *International Journal of Diversity in Education*, 25(2), 1–21. <https://www.scopus.com/pages/publications/85218859740>
- Liamputtong, P. (2020). *Qualitative research methods (5th ed.)*. Oxford University Press.
- Mastina, T., & Mitra, M. (2023). Peran koordinasi lintas sektor dalam aksi konvergensi penurunan stunting. *Jurnal Promotif Preventif*, 6(1), 131–144. <https://doi.org/10.47650/jpp.v6i1.725>
- Moleong, L. J. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Jakarta: Kencana.
- Ruskarini, D. (2017). *Dasar-dasar metode penelitian kualitatif*. Surabaya: Cakra Ilmu.
- Sarwono. (2016). *Teori Psikologi Sosial*. Rajawali.
- Simangunsong, F. (2017). *Metode penelitian sosial kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Utami Putri, K., Hasanbasri, M. H., & Padmawati, R. S. (2022). Dukungan lintas sektor untuk pencegahan stunting melalui posyandu: Studi kasus di Kota Yogyakarta (Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada). <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/217430>
- Valdivia-Yábar, S. V., & López, C. H. (2022). Digital uses of students and college success. *Journal of Higher Education Theory and Practice*, 22(18), 223–238. Retrieved from <https://www.scopus.com/pages/publications/85146751166>